

## Ringkasan Esekutif

### International Lecture by Prof. Christopher Stone **The Ideal Concept of Investigation in Criminal Justice System**

**44.273  
PERKARA  
MANGKRAK  
DI TAHAP  
PENYIDIKAN**

Mengingat terdapat 44.273 perkara yang menggantung pada tahap penyidikan, dan banyaknya laporan masyarakat kepada ombudsman terkait buruknya kinerja penegak hukum di tahap penyidikan, maka MaPPI FHUI bekerjasama dengan Yayasan Tifa menginisiasi suatu Kuliah Umum (International Lecture) dengan tema "*The Ideal Concept of Investigation in Criminal Justice System*" yang telah membahas secara mendalam perihal konsep proses investigasi yang ideal, sekaligus melakukan perbandingan antara hubungan polisi dengan kejaksaan, serta proses investigasi penanganan suatu perkara pidana di berbagai negara.

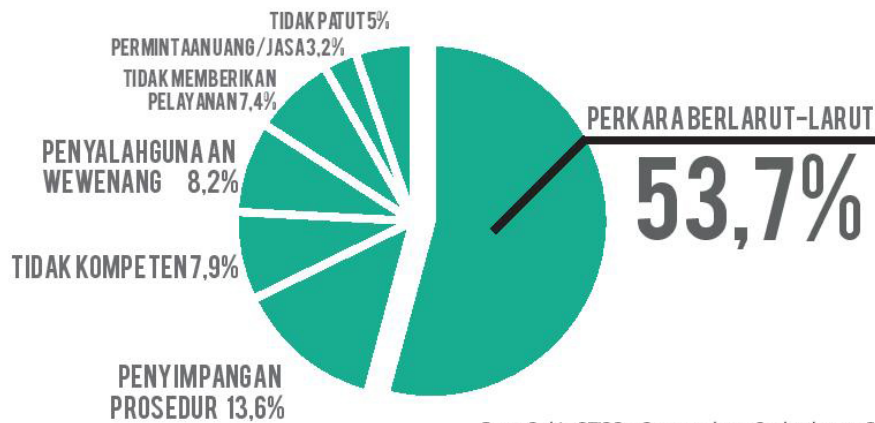
Tujuan hukum serta sistem peradilan pidana mestinya mewujudkan keadilan di masyarakat. Keduanya akan optimal jika pemerintah dapat melaksanakannya dengan baik dan masyarakat mematuhi dan menghormatinya dengan menjalankan ketentuan yang ada

Maraknya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum oleh aparatnya menjadi salah satu indikator bahwa hukum dan sistem peradilan pidana belum mampu mencapainya;



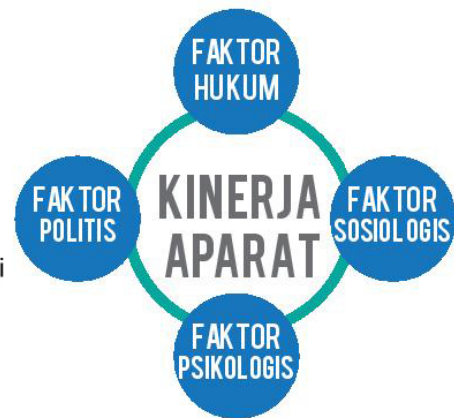
- Salah satu contohnya ialah laporan masyarakat terkait kepolisian yang menduduki peringkat kedua dari total laporan masyarakat kepada Ombudsman. Mayoritas laporan tersebut terkait diskriminasi proses penegakan hukum dan penanganan perkara yang berlarut-larut;

### DUGAAN MALADMINISTRASI DIKEPOLISIAN (2016)

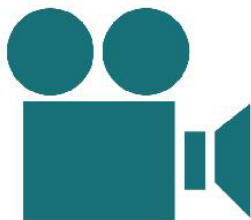


Data: Pokja PTIPP – Pencegahan, Ombudsman RI

- Kendala dan permasalahan pelaksanaan oleh aparat penegak hukum dipengaruhi berbagai macam faktor. Selain faktor hukum atau peraturannya, terdapat juga faktor psikologis, sosiologis, dan politik yang menyebabkan aparat penegak hukum bekerja kurang optimal dan profesional;
- Reformasi hukum dan sistem peradilan pidana perlu mempertimbangkan secara teliti faktor-faktor tersebut di atas yang menjadi akar permasalahannya;
- Perumusan pembaruan hukum dan sistem peradilan pidana dapat juga dilakukan dengan mempelajari berbagai sistem yang ada di dunia;
- Sistem penanganan perkara terpadu dan terintegrasi di KPK menjadi salah satu praktik baik. Oleh karena berada dalam satu institusi, pemahaman dan pandangan penyidik dan penuntut umum yang menangani kasus tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya;
- Sistem ini terbukti menghasilkan penanganan dan pembuktian perkara korupsi yang berkualitas dan profesional;
- Namun, kejelian dalam perumusan sangat diperlukan karena tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna dan memiliki praktik terbaik.
- Pemangku kebijakan perlu mempelajari dan menyiasati agar kekurangan tersebut menjadi sangat kecil dan praktik secara umum berjalan dengan baik;
- Penelusuran dan pencarian untuk mereformasi sistem peradilan pidana untuk mewujudkan



- masyarakat yang adil adalah kerja yang terus-menerus dan berkelanjutan;
- Reformasi tersebut juga perlu dilakukan seiring sejalan dengan pelaksanaan. Kesalahan, distorsi, atau kekurangan dapat terjadi pada tataran implementasi. Oleh karena itu, sistem yang tidak berjalan atau tidak mencapai tujuannya perlu segera direformasi kembali;
  - Salah satu metode reformasi sistem peradilan pidana yang menarik adalah melalui eksperimen; Sebelum mengesahkan dan melaksanakan kebijakan baru pada sistem peradilan pidana, eksperimen pada populasi dan wilayah terbatas menjadi layak dilakukan;
  - Eksperimen pembaruan sistem peradilan pidana membuat kesuksesan dan kegagalan kebijakan dapat diukur dan dievaluasi lebih mudah. Melalui eksperimen, akibat buruk dari kebijakan baru dapat diantisipasi;
  - Selain itu, eksperimen pada lingkup yang lebih kecil memperbesar potensi atau peluang penerimaan institusi penegak hukum sebagai pelaksana dari sisi politik, psikologis, dan sosiologis lembaga;



## REKAMAN VIDEO DAN SUARA MEMINIMALISIR POTENSI PENYIKSAAN

- Terdapat eksperimen menarik untuk mengatasi permasalahan penyiksaan dan pengakuan tidak suka rela tersangka pada tahap penyidikan di Tiongkok;
- Pada eksperimen, tersangka diberikan 4 pilihan untuk melakukan pemeriksaan secara tradisional, menggunakan pengacara, menggunakan perekaman suara (*audio recording*), atau dengan perekaman video (*video recording*). Tersangka boleh mengganti pilihannya pada tahapan pemeriksaan berikutnya;
- Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada pertamanya, banyak orang memilih pengacara tetapi pada pemeriksaan selanjutnya lebih banyak yang memilih video recording. Perubahan keputusan tersangka ini didasarkan pada terbatasnya jumlah dan kualitas pengacara;
- Hasil eksperimen ini kemudian diadopsi dalam perubahan hukum dan sistem peradilan pidana di Tiongkok. Saat ini, seluruh penyidikan di Tiongkok melalui perekaman video sehingga dapat mengantisipasi terjadinya penyiksaan;
- Hal menarik lainnya, eksperimen ini dilakukan dengan menanyakan pilihan tersebut kepada tersangka, bukan kepada ahli ataupun masyarakat. Ini adalah '*the most democratic model of criminal justice system reform*'.

“Banyaknya koruptor yang berhasil dipenjarakan tidak dapat dilihat sebagai suatu hal yang membanggakan.

Oleh karena itu, upaya pencegahan kasus harus dilakukan dengan benar sehingga terdapat perbaikan sistem di setiap level pemerintahan”



*Laode Muhammad Syarif*  
(Komisi Pemberantasan Korupsi)



“Tidak ada satupun sistem peradilan pidana yang ideal. Semua memiliki kekurangan, namun kita harus tetap mencari dan berharap agar kekurangan tersebut sangat kecil.”

*Prof. Christopher Stone*  
(Open Society Foundation)

“Kalau sistem peradilan pidana tidak mencapai tujuannya, yakni keadilan, maka semua pihak yang terlibat dalam sistem itu memiliki andil dalam kegagalan system ini, dan harus merasa bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.”



*Prof. Topo Santoso*  
(Universitas Indonesia)



“Mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait kepolisian, maka dalam konteks penegakan hukum, kepolisian membutuhkan dukungan bersama untuk menegakkan hukum.”

*Ninik Rahayu*  
(Ombudsman Republik Indonesia)